

BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA

Sebuah kajian dwi-bulanan tentang kebijakan subsidi energi Indonesia dan pasar energi

Januari 2016

Sebagai bagian dari kerjanya di bidang kebijakan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, the Global Subsidies Initiative (GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD) menerbitkan briefing rutin tentang isu terkait subsidi energi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Lucky Lontoh di lucky.lontoh@iisd.org.

Sorotan

- Pada 29 Desember 2015, PT PLN mengumumkan serangkaian penurunan harga untuk koneksi listrik kelas tarif non-subsidi.
- Pada 4 Januari 2016, CEO PT Pertamina, Dwi Soetjipto, mengumumkan serangkaian penurunan harga bahan bakar. Perubahan harga tersebut berlaku atas bahan bakar bersubsidi dan non-subsidi.
- Pemerintah menegaskan kembali kebijakannya untuk mengkaji harga bahan bakar domestik secara rutin setiap tiga bulan sekali.
- Rencana pemerintah untuk membentuk Dana Ketahanan Energi menjadi bahan perdebatan publik yang luas, khususnya terkait dasar hukum pembentukannya.

Perubahan Harga Bahan Bakar 2016

Pada 4 Januari 2016, CEO PT Pertamina, Dwi Sucipto, mengumumkan serangkaian penurunan harga bahan bakar. Perubahan harga tersebut diberlakukan atas bahan bakar bersubsidi dan non-subsidi sebagai respon terhadap jatuhnya harga minyak internasional, penguatan nilai rupiah, dan keputusan pemerintah untuk menunda pembentukan Dana Ketahanan Energi yang dalam rencana awal akan mulai dilaksanakan pada awal 2016 (KOMPAS, 2016).

Perubahan harga tersebut terjadi menyusul maraknya diskusi publik terkait Dana Ketahanan Energi (DKE) yang akan dibentuk. Pada 23 Desember lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, mengumumkan rencana pemerintah untuk menarik retribusi dari bensin dan diesel bersubsidi mulai awal 2016 untuk menghasilkan pemasukan untuk membiayai dana baru tersebut. Pemerintah berencana menerapkan retribusi sebesar Rp.200 per liter untuk bensin bersubsidi dan Rp.300 per liter untuk diesel bersubsidi (Republika, 2015). Rencana pemerintah untuk membentuk Dana Ketahanan Energi sebenarnya telah dipersiapkan sepanjang 2015, yang bertujuan utama untuk mendorong eksplorasi minyak dan gas dan mengembangkan sumber daya energi

terbarukan yang baru.

Menurut Sudirman Said, kerangka hukum yang menjadi landasan pembentukan DKE adalah UU Energi No.30/2007, yang menyatakan “Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian terkait energi baru dan terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan”. Namun, pernyataan Sudirman Said tentang retribusi yang akan diterapkan justru membuat Dana Ketahanan Energi menjadi bahan perdebatan publik yang cukup luas, khususnya terkait dasar hukum pelaksanaannya (KataData, 2015).

Komisaris Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, secara terbuka menyatakan bahwa landasan hukum yang ada saat ini hanya merujuk pada operator hulu dan tidak memberikan dasar hukum untuk menarik retribusi pada harga eceran konsumen sebagaimana yang ingin dilakukan pemerintah. Menurut Dalimi, pembentukan dana tersebut memerlukan kebijakan tersendiri, khususnya untuk mengatur cara pengumpulan dan fungsi dana tersebut. Rinaldy Dalimi juga mengatakan bahwa retribusi tersebut seharusnya diterapkan pada seluruh produk bahan bakar fosil, bukan hanya pada bahan bakar bersubsidi (CNN Indonesia, 2015).

Sementara itu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, berpendapat bahwa Dana Ketahanan Energi akan berisiko menyebabkan misalokasi pemasukan jika dana tersebut digabungkan ke dalam pemasukan negara reguler, dan tidak terhubung secara khusus dengan isu-isu keamanan energi. Namun pada saat yang sama, Tulus Abadi juga mengakui perlunya menciptakan disinsentif atas penggunaan bahan bakar fosil dan menyarankan adanya kerangka kelembagaan yang baik untuk dana tersebut, termasuk prosedur yang jelas untuk mengelola dana tersebut, juga rencana yang jelas tentang cara meningkatkan keamanan energi.

Tabel 1: Harga Bahan Bakar Bersubsidi di Indonesia setelah 5 Januari 2016 (Rp per liter)

Jenis Bahan Bakar/Merk	Sebelum 5 Januari 2016	Setelah 5 Januari 2016
Bensin RON 88 "Premium" untuk Jawa-Madura-Bali	7,400 (USD 0.518)	7,050 (USD 0.486)
Bensin RON 88 "Premium" untuk luar Jawa-Madura-Bali	7,300 (USD 0.511)	6,950 (USD 0.486)
Diesel Otomotif "Solar"	6,700 (USD 0.469)	5,650 (USD 0.395)

Sumber: (PT Pertamina, 2016).

Tabel 2: Harga Bahan Bakar Non-Subsidi Indonesia setelah 5 Januari 2016 (Rp per liter)

Jenis Bahan Bakar/Merk	Sebelum 5 Januari 2016	Setelah 5 Januari 2016
Bensin RON 90 "Pertalite"	8,250 (USD 0.577)	7,900 (USD 0.553)
Bensin RON 92 "Pertamax" untuk Jakarta dan Jawa Barat West Java	8,750 (USD 0.612)	8,600 (USD 0.602)
Bensin RON 95 "Pertamax Plus" untuk Jakarta	9,650 (USD 0.602)	9,400 (USD 0.658)
Diesel Otomotif "Solar" (non-subsidi)	8,300 (USD 0.581)	8,050 (USD 0.563)
Diesel Otomotif "Pertamina Dex" (non-Subsidi) untuk Jakarta	9,850 (USD 0.689)	9,600 (USD 0.672)
LPG 12kg (Catatan: penurunan harga rata-rata nasional per silinder)		5,800 (USD 0.406)
LPG 12kg untuk Wilayah Jabodetabek (Catatan: penurunan harga rata-rata per silinder)		5,600 (USD 0.392)

Sumber: (PT Pertamina, 2016).

Mekanisme penetapan harga baru untuk bahan bakar bersubsidi

Sejak pemerintah memperkenalkan mekanisme penetapan harga baru sebagai bagian dari reformasi subsidi bahan bakar pada awal 2015, banyak musyawarah telah dilakukan terkait seberapa sering penyesuaian harga harus dilakukan. Pada masa awal perubahan harga yang sering terjadi, terutama saat terjadi penurunan harga, pemerintah sempat memperpanjang interval waktu antara setiap perubahan harga, lalu belakangan memutuskan untuk tidak menerapkan penyesuaian ke harga eceran konsumen seperti yang direncanakan. Hal ini menyebabkan harga bensin bersubsidi (merk premium) tetap stabil sejak tanggal 28 Maret hingga penyesuaian harga yang baru-baru ini dilakukan. Harga Solar juga sempat sekali mengalami penyesuaian ketika diturunkan sebesar Rp.200 pada 7 Oktober 2015, seiring dengan dilakukannya sejumlah penyesuaian harga atas bahan bakar non-subsidi. Ketika mengumumkan penyesuaian harga terbaru, Menteri Sudirman Said juga menegaskan kembali kebijakan pemerintah yang akan mengkaji kembali harga bahan bakar domestik setiap tiga bulan sekali.

Tabel 3: Penyesuaian harga untuk bahan bakar bersubsidi sejak November 2014 (Rp per liter)

Tanggal	Bensin RON 88 "Premium" untuk luar Jawa-Madura-Bali	Diesel Otomotif "Solar"
November 2014	6,500 (USD 0.455)	5,500 (USD 0.385)
18 November 2014	8,500 (USD 0.595)	7,500 (USD 0.525)
1 Januari 2015	7,600 (USD 0.532)	7,250 (USD 0.507)
19 Januari 2015	6,600 (USD 0.462)	6,400 (USD 0.448)
1 Maret 2015	6,800 (USD 0.467)	6,400 (USD 0.448)
28 Maret 2015	7,300 (USD 0.511)	6,900 (USD 0.483)
7 Oktober 2015	7,300 (USD 0.511)	6,700 (USD 0.469)
5 Januari 2016	6,950 (USD 0.486)	5,650 (USD 0.395)

Sumber: GSI 2015.

Penurunan Tarif Listrik pada 2016

Pada 29 Desember 2015, PT PLN mengumumkan serangkaian penurunan harga untuk kelas tarif non-subsidi. Penurunan harga tersebut adalah bagian dari penyesuaian harga bulanan rutin untuk listrik non-subsidi, dan menurut keterangan PT PLN, perubahan harga tersebut disebabkan jatuhnya harga minyak internasional dan menguatnya rupiah (PT PLN, 2015).

Pasar listrik Indonesia dibagi menjadi 12 kelas tarif non-subsidi dan 2 kelas tarif subsidi. Kelas tarif non-subsidi dibagi menjadi: Rumah Tangga[®], Bisnis (B), Industri (I), Pemerintah, Layanan Publik dan Penerangan (P), dan Tujuan Khusus (L).

Pemerintah masih menyediakan listrik bersubsidi bagi dua kelas koneksi terendah, yaitu 450VA dan 900VA,

Tabel 4: Penyesuaian Tarif Listrik

Kelas tarif	Koneksi Listrik	Tarif (Rp/kWh) Desember 2015	Tarif (Rp/kWh) Januari 2016
R1	1,300VA	1,509.38 (USD 0.10)	1,409.16 (USD 0.09)
R1	2,200VA	1,509.38 (USD 0.10)	1,409.16 (USD 0.09)
R2	3,500VA– 5,500VA	1,509.38 (USD 0.10)	1,409.16 (USD 0.09)
R3	> 6,600VA	1,509.38 (USD 0.10)	1,409.16 (USD 0.09)
B2	6,600VA– 200kVA	1,509.38 (USD 0.10)	NA
B3	> 200kVA	1,104.73 (USD 0.07)	1,007.15 (USD 0.07)
I3	> 200kVA	1,104.73 (USD 0.07)	1,007.15 (USD 0.07)
I4	> 30,000kVA	1,059.99 (USD 0.07)	970.35 (USD 0.06)
P1	6,600VA– 200kVA	1,509.38 (USD 0.10)	NA
P2	> 200kVA	1,104.73 (USD 0.07)	1,007.15 (USD 0.07)
P3	-	1,509.38 (USD 0.10)	NA
L/TR, TM, TT	-	1,644.82 (USD 0.11)	NA
Kelas Ber-subsidi	450VA	415 (USD 0.02)	415 (USD 0.02)
Kelas Ber-subsidi	900VA	605 (USD 0.04)	605 (USD 0.04)

Sumber: (PT PLN, 2015), (Tempo, 2016), (Beritagar, 2016).

namun skema tersebut akan direformasi tahun ini. Reformasi subsidi listrik sebenarnya akan diterapkan pada awal 2016, namun pada November 2015 pemerintah mengumumkan keputusannya untuk menunda pelaksanaannya hingga Juli karena alasan teknis. Sebagaimana dilaporkan oleh GSI pada November 2015, reformasi subsidi listrik diharapkan dapat mengurangi secara signifikan jumlah penerima subsidi dan dapat menarget subsidi hanya untuk rumah tangga miskin dan rentan.

Referensi

- Antara. (2015, December 13). Pemerintah berencana bentuk dana energi 2016. Retrieved from <http://www.antaranews.com/berita/534807/pemerintah-berencana-bentuk-dana-energi-2016>
- Beritagar. (2016, January 1). Tarif listrik Januari 2016 rata-rata turun Rp100 per kWh. (2, Producer) Retrieved from <https://beritagar.id/artikel/berita/tarif-listrik-januari-2016-rata-rata-turun-rp100-per-kwh>
- Cabinet Secretariat. (2015, December 23). Sudirman said Pengumuman Harga BBM. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=SaRw9c2benw>
- CNN Indonesia. (2015, December 30). DEN: Dana Ketahanan Energi Harus Dipayungi Aturan Hukum Baru. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151230165002-85-101245/den-dana-ketahanan-energi-harus-dipayungi-aturan-hukum-baru/>
- Directorate General of New and Renewable Energy. (2015, November 10). Pengembangan Energi Baru Terbarukan Butuh Rp. 1600 Triliun. Retrieved from <http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/10/1005/pengembangan.energi.baru.terbarukan.butuh.rp.1600.triliun>
- Gatra. (2015, December 30). YLKI: Dana Ketahanan Energi Rawan Penyelewengan! . Retrieved from <http://www.gatra.com/nusantara/nasional/180466-ylki-dana-ketahanan-energi-rawan-penyelewengan>
- GATRA News. (2015). Retrieved from <http://www.gatra.com/nusantara/nasional/180466-ylki-dana-ketahanan-energi-rawan-penyelewengan>
- GSI. (2015, November). Indonesia Energy Subsidy Briefing - November 2015. (Global Subsidies Initiative) Retrieved from https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_newsbriefing_Nov2015_eng.pdf
- indexmundi. (2015). Crude Oil (petroleum); Dated Brent Daily Price . Retrieved from <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil-brent&months=12>
- KataData. (2015). Retrieved from <http://en.katadata.co.id/news/2015/12/29/energy-sustainability-fund-dues-can-be-considered-as-illegal>
- KOMPAS. (2016, January 4). Pungutan Dana Ketahanan Energi Ditunda, Harga BBM Turun. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/04/190113426/Pungutan.Dana.Ketahanan.Energi.Ditunda.Harga.BBM.Turun>
- Ministry of Energy and Natural Resources. (2015, September 24). DANA KETAHANAN ENERGI DKE. (W. Sabandar, Producer) Retrieved from http://www.unorcid.org/upload/REDD_Academy_William_Sabandar_24-25_November.pdf
- New York Times. (2015, December 21). http://www.nytimes.com/2015/12/22/business/energy-environment/oil-prices-opec.html?_r=0. Retrieved from http://www.nytimes.com/2015/12/22/business/energy-environment/oil-prices-opec.html?_r=0
- Ortax. (2015, December 30). Pemerintah Pertahankan Asumsi Makro APBN 2016. Retrieved from <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14556&q=&hlm=>
- PT Pertamina. (2016, January 5). TABEL PENURUNAN HARGA JUAL BBM UMUM , JBT dan JBKP Berlaku TMT 5 Januari 2016 . Retrieved from <http://www.pertamina.com/news-room/info-pertamina/pengumuman/tabel-penurunan-harga-jual-bbm-umum-,-jbt-dan-jbkp-berlaku-tmt-5-januari-2016/>
- PT PLN. (2015, December 29). Tarif Listrik Januari 2016 Turun. Retrieved from <http://www.pln.co.id/blog/tarif-listrik-januari-2016-turun/>
- Republika. (2015, December 23). Masyarakat Dibebankan Pungutan Dana Ketahanan Energi Per Liter BBM. Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/23/nztaju365-masyarakat-dibebankan-pungutan-dana-ketahanan-energi-per-liter-bbm>
- Tempo. (2016, January 1). Tarif Listrik 1.300 - 2.200 W, Habis Naik 11 %, Turun 6 %. Retrieved from <http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/01/090732243/tarif-listrik-1-300-2-200-w-habis-naik-11-turun-6>

Published by the International Institute for Sustainable Development.

International Institute for Sustainable Development
Head Office
161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4
Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: www.iisd.org

About IISD

The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable development by advancing policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change and energy, and management of natural and social capital, as well as the enabling role of communication technologies in these areas. We report on international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects, resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks spanning the North and the South, and better global connections among researchers, practitioners, citizens and policy-makers.

IISD's vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling societies to live sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), the International Development Research Centre (IDRC), and from the Province of Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations and the private sector.

About GSI

GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a spotlight on subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact efforts to put the world economy on a path toward sustainable development. In cooperation with a growing international network of research and media partners, GSI seeks to lay bare just what good or harm public subsidies are doing; to encourage public debate and awareness of the options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools they need to secure sustainable outcomes for our societies and our planet.

International Institute for Sustainable Development
Global Subsidies Initiative
International Environment House 2
9 chemin de Balaxert, 1219 Châtelaine,
Geneva, Switzerland

cbeaton@iisd.org
lucky.lontoh@iisd.org

Tel: +41 22 917-8373
Fax: +41 22 917-8054

<http://www.iisd.org/gsi/>